



# Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan RPJM Desa Berbasis Partisipatif Di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan

Zuhrotun Nisak<sup>1</sup>, Dwi Hari Prayitno<sup>2</sup>, Khoirum Maqoma<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan

Email: klik.nisa@gmail.com, dwihari@unisla.ac.id, khoirummaqomah@gmail.com

## Abstrak

Kegiatan pelatihan penyusunan RPJM Desa bertujuan memberikan kemudahan dalam penulisan, teknik perencanaan serta pemecahan analitis atas permasalahan pembangunan yang dihadapi desa, khususnya desa yang mengalami ketertinggalan seperti Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Di samping itu membantu meringankan tugas pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menghasilkan output RPJMDesa yang bermutu dan tepat sasaran. Metode kegiatan yang digunakan adalah dalam bentuk pelatihan dan pendampingan dengan mengacu pada analisis alternatif rencana dan tindak pemecahan masalah pada masing-masing bidang di satuan desa dengan basis partisipatif. Hasil output dari kegiatan ini pertama, aparatur desa sangat antusias dalam mempelajari metode penyusunan RPJMDesa karena dianggap sebagai pengetahuan baru. Kedua, metode ini mudah disusun dan diaplikasikan dalam RPJMDesa. Ketiga, aparatur desa dan masyarakat menambah wawasan pengetahuan dan bahasa ilmiah yang belum diketahui sebelumnya. Outcome kegiatan adalah menjadi motor penggerak dan konsultan pendamping bagi desa-desa yang belum mandiri.

**Kata Kunci:** Partisipatif, RPJMDesa, Pelatihan, Pendampingan

## 1. Pendahuluan

Sumber Daya Alam Desa Banjarmadu memiliki potensi perikanan air tawar/darat komoditi Ikan Mas dengan hasil 35 ton per tahunnya dengan nilai uang Rp. 10,500,000.00. Untuk Ikan Bandeng 135 ton pertahun dengan nilai uang Rp. 67,500,000.00. Pemasarannya dilakukan melalui tengkulak. Dalam bidang pertanian untuk hasil tanaman Palawija komoditi Kedelai luas lahan 1 ha. dengan hasil 2 ton/ha Rp. 10,000,000.00, kacang tanah luas lahan 1 ha. dengan hasil 1 ton/ha. Rp. 5,000,000.00, Koro bengkok luasa lahan 1 ha, dengan hasil 0,5 ton/ha, Rp. 1,500,000.00, kacang panjang luas lahan 2 ha, dengan hasil panen 0,5 ton/ha, Rp. 250,000.00, Kacang Hijau luas lahan 1 ha, dengan hasil 2 ton/ha, Rp. 10,000,000.00, Jagung luas lahan 75 ha, dengan hasil 4 ton/ha, Rp. 8,000,000.00. Ubi kayu luas lahan 1 ha, dengan hasil panen 1 ton/ha Rp. 250,000.00. Untuk tanaman padi sawah menghasilkan 185 Ton yang jika dirupiahkan Rp. 87,000,000.00. sedangkan hasil tanaman padi ladang luas lahan 12 ha, dengan hasil panen 8 ton/ha Rp. 23,000,000.00. Untuk Peternakan ada 185 orang peternak sapi potong, 200 orang peternak kambing, ternak domba --- orang, 4,000 orang yang berternak ayam ras.

Sumber Daya Manusia Desa Banjarmadu memiliki 298 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk Desa Banjarmadu tahun ini 4.008 Jiwa sedangkan untuk tahun lalu sebanyak 4,025 Dengan struktur mata pencarian, Petani sebanyak 720 orang, untuk sektor industri ada 100 orang sedangkan yang bergerak di sektor jasa/perdagangan ada 125 orang. Ada sebanyak 5 PNS (Pegawai Negeri sipil) dan 7 warga Desa Banjarmadu yang menjadi anggota TNI/POLRI. 10 orang menjadi guru, 1 orang bidan dan 2 orang mantri kesehatan. Jumlah penduduk usia 15-55 yang belum bekerja sebanyak 69 orang sedangkan jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun sebanyak 70 orang. Jumlah penduduk Usia 7-15 tahun yang masih sekolah sebanyak 687 orang sedangkan yang tidak sekolah sebanyak 682 orang.

Dalam bidang Ekonomi Masyarakat Produk Domestik bruto tahun ini untuk pertanian Rp. 87,000,000.00. Ladang/tegalan Rp. 23,200,000.00, Peternakan Rp. 50,000,000.00. Perikanan





Rp. 88,500,000.00, di sektor perdagangan Rp. 51,000,000.00. sedangkan untuk industri Rumah Tangga Rp. 50,000,000.00 Untuk bangunan rumah menurut dinding tembok sebanyak 207 orang, dinding kayu 475 orang sedangkan rumah Bambu ada 195 orang.

Penduduk Desa Banjarmasin yang memiliki kendaraan bermotor roda dua sebanyak 550 KK. Pemilik kendaraan roda 3 sebanyak 2 KK, Pemilik kendaraan roda empat/lebih sebanyak 36 KK, Pemilik perahu sebanyak -- orang, Sedangkan pemilik pesawat TV 700 KK. Dalam bidang kesejahteraan Penduduk Jumlah keluarga Prasejahtera 445 KK, Keluarga Sejahtera I sebanyak 170 KK, Keluarga sejahtera II 16 KK, keluarga sejahtera III 517 KK dan Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 2 KK.

Sejak tahun 2014, sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan ini terjadi karena mulai diterapkannya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan dimana pemerintah daerah termasuk pemerintah desa diberikan sumber keuangan dan kewenangan lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ditambah lagi sejak diterbitkannya UU no 6 tahun 2014 kemudian disusul Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2015 tentang pemerintahan desa mengamanatkan bahwa pemerataan pembangunan harus dimulai dari desa.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah pusat memberikan dana desa yang sangat fantastik dengan masing-masing desa mendapatkan kurang lebih 1,4 milyar rupiah. Dana desa ini dapat dikelola dengan baik dan akuntabel apabila perencanaan pembangunan desa telah dibuat dengan benar dan tepat sasaran yang terbungkus dalam dokumen RPJMDesa. Penyusunan RPJMDesa berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Namun demikian, tidak semua aparat desa dapat membuat RPJMDesa dengan baik sesuai dengan kebutuhan, meskipun terdapat panduan teknis dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang dimotori oleh Bapennas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunan diwajibkan kepada setiap pemerintahan di tingkat desa. Pembuatan RPJMD ini biasanya dilakukan dalam periode lima tahunan setelah pelantikan kepala daerah untuk tingkat kota kabupaten dan propinsi, dan kepala desa untuk tingkat wilayah desa. Dalam RPJMD bersifat lebih operasional, namun untuk mewujudkan perencanaan yang terpadu baik di tingkat nasional, maupun di masing-masing daerah dan desa harus diawali dari sebuah pemilihan kepala daerah ataupun desa. Pemilihan kepala daerah secara serentak telah dilaksanakan Bangsa Indonesia pada Desember tahun 2015 lalu. Cara pemilihan seperti ini setidaknya akan membuat masa tugas dan jadwal waktu perencanaan pada RPJM menjadi sama dan terukur. Inilah sebenarnya yang dibutuhkan agar perencanaan pembangunan Indonesia terintegrasi secara nasional dari tingkat pusat, lokal daerah hingga tingkat desa.

Hasil sebuah perencanaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat apabila dalam penyusunannya melibatkan partisipasi dari masyarakat. Tanpa partisipasi, biasanya hasil perencanaan berakibat pada kekecewaan karena tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat. Di samping itu, akan sulit mengharapakan masyarakat untuk mematuhi dan menjaga pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. Bahkan tidak jarang pula terjadi, masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah dibangun oleh pemerintah desa. Oleh karena itu sangat tepat kiranya bilamana dalam pembuatan RPJMDesa melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan perencanaan pembangunan desa.

Menurut Syafrizal (2014: 30) terdapat cara yang bisa dimanfaatkan untuk membangun partisipasi yaitu dengan melakukan jaringan aspirasi masyarakat (Jaringan Asmara) dalam bentuk pertemuan, diskusi, dan seminar guna mendapatkan pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. Aspirasi masyarakat sebenarnya dapat juga dilakukan atau diserap pada saat pelaksanaan MUSREMBANG Desa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang no 25 tahun 2004.

Permasalahannya kini, bahwa penyusunan RPJMDesa tidaklah mudah melainkan dibutuhkan perhatian khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi desa yang ditinggalinya. Pada umumnya banyak ditemukan desa-desa di wilayah Indonesia bahwa aparat desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa dan jajarannya tidak semua berasal dari masyarakat kelas menengah berpendidikan tinggi, memiliki banyak pengalaman dan teori dalam bidang





perencanaan. Oleh karenanya penyusunan RPJMDesa diperlukan pelatihan dan pendampingan khususnya bagi Desa Banjarmadu yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurang pengetahuan dan keterampilan penyusunan RPJMDesa, fasilitas sarana prasarana desa tidak memadai, serta letak geografis yang tidak menunjang.

Berdasarkan analisis situasi yang diuraikan di atas, perlu kiranya institusi akademisi yang memiliki kemampuan pada metode perencanaan pembangunan untuk membagikan dan transfer ilmu serta keahlian melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka ikut serta membantu tugas pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat desa untuk menguatkan pelaksanaan otonomi desa melalui pelatihan penyusunan RPJMDesa.

## 2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pelatihan dan pendampingan kepada aparatur desa untuk menyusun RPJMDesa di Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Aparatur desa terdiri dari Kepala desa, Sekretaris desa, ketua LPD, LPM, kepala bidang dan staf desa (bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat), kelian banjar, kelian dinas, dan tokoh masyarakat. Tahap pertama kegiatan adalah melakukan survei desa dan audiensi persiapan pelaksanaan pelatihan dengan menjangkau aspirasi dari berbagai pihak baik dari kepala desa, sekretaris desa, ketua LPM, LPD, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh pada masyarakat desa. Hasil audiensi untuk mendapatkan gambaran dan pemetaan masalah desa kemudian ditentukan metode yang tepat untuk pelatihan di kemudian hari.

Tahap kedua adalah menjelaskan materi RPJMDesa dengan menggunakan teknik analisis, metodologi dan indikator pemecahan masalah yang mudah dipahami dan diimplementasikan oleh tim penyusun RPJMDesa. Pemberian materi diikuti dengan diskusi tanya jawab dan mengakomodir semua input dari peserta. Tahap selanjutnya adalah pelatihan dan penulisan penyusunan RPJMDesa oleh masing-masing bidang yang sudah ditentukan oleh desa. Dalam hal ini ada empat bidang yaitu 1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 2). Bidang Pemberdayaan Desa, 3). Bidang Pembinaan Desa, 4). Bidang Pembangunan Desa). Kegiatan ini disertai pendampingan dan konsultasi. Penyusunan RPJMDesa ini ditulis berdasarkan kondisi pembangunan desa secara real, bukan imajinatif.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dalam waktu lima jam (pkl. 09.00-14.00 wita). Penyusunan RPJMDesa bukanlah sesuatu yang mudah, dibutuhkan analisis data dan informasi real sesuai dengan kondisi desa sebenarnya. Oleh karenanya sebelum pelatihan, peserta sudah menyiapkan data dan informasi di bidangnya masing-masing. Sehingga pada saat pelatihan tinggal didiskusikan mengenai permasalahan apa yang menjadi prioritas diajukan dalam draf RPJMDesa. Setelah penyusunan poin-poin draf RPJMDesa, hasilnya dipresentasikan di depan forum selama 15 menit (5 menit presentasi dan 10 menit tanya jawab) dengan harapan dapat memberikan masukan dan arahan dari hasil kegiatan pelatihan. Di akhir kegiatan dilakukan evaluasi hasil pembelajaran pelatihan penyusunan draf RPJMDesa yang sudah dikerjakan oleh masing-masing bidang desa. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di kantor kepala desa, ruangan pertemuan Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng dengan didampingi oleh beberapa dosen dan dibantu oleh mahasiswa fakultas Akuntansi Universitas Islam Lamongan.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan dan pelatihan RPJMDesa dilaksanakan selama 2 bulan di Desa Banjarmadu Karanggeneng Lamongan. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 orang peserta yang terdiri dari Kepala desa, sekretaris desa, ketua LPM, ketua LPD, staf aparatur desa, kepala bidang dan tim penyusunan RPJMDesa, kelian adat, kelian banjar, perwakilan PKK, Tokoh masyarakat, tim dosen Akuntansi Unisla dan juga mahasiswa.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang diimplementasikan oleh Program Studi Akuntansi Universitas Islam Lamongan direspon sangat baik oleh kepala desa, staf aparatur desa dan





juga masyarakat Desa Banjarmadu. Kondisi desa dengan SDM terbatas membutuhkan transformasi pengetahuan dan keterampilan dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan desa untuk menghasilkan produk RPJMDesa berkualitas. Alasan yang lain adalah: pertama, Kepala Desa Banjarmadu dianggap minim pengalaman, kurang pengetahuan dan *skill* pengelolaan pemerintahan desa terutama dalam menyusun rancangan pembangunan desa (RPJMdesa). Kedua, Desa Banjarmadu tidak memiliki banyak potensi desa yang dapat menyumbangkan (PAD) pendapatan asli desa. Potensi desa hanya bersumber dari hasil pertanian, perikanan dan hasilnya tidak mencukupi ekonomi masyarakat. Ketiga, pemahaman aparatur desa yang minim terhadap teknik analisis penyusunan RPJMDesa untuk menentukan sasaran obyek dan mampu menyelesaikan permasalahan desa.

Sebenarnya aparatur Desa Banjarmadu sudah sangat familiar dengan RPJMDesa, sebab setiap lima tahun sekali kegiatan ini dilakukan. Namun demikian sering mengalami kesulitan dalam memformulasikan permasalahan desa yang begitu banyak dan harus diinput dalam RPJMDesa disamping sumber informasi dan data yang juga terbatas. Sebagai contoh aparatur desa kesulitan menentukan kategori miskin karena perbedaan data dan informasi yang tidak jelas terhadap sumber yang akan dipakai. Selain itu, penggunaan metodologi sebagai cara menentukan informasi dan mengolah data kurang diperhatikan sehingga aparatur desa belum bisa menentukan permasalahan dengan skala prioritas. Yang terjadi adalah perdebatan kusir di ruang rapat yang tidak pernah selesai terjawab.

Oleh karena itu, beberapa keluhan dan pertanyaan peserta yang muncul telah dikemas dengan materi pelatihan yang lebih mengedepankan tindakan konsultatif, penyediaan ruang partisipatif, dan melakukan analitis alternatif dalam pemecahan tindakan yang dilakukan pada masing-masing bidang kerja perumusan RPJMDesa yang sudah ditentukan. Pemberian materi dilakukan secara singkat, agar peserta lebih fokus pada pelatihan penulisan draf RPJMdesa. Peserta dibagi kelompok berdasarkan bidang kerjanya masing-masing, setiap bidang, misalnya bidang pelaksanaan pembangunan desa menuliskan dan menginput permasalahan pokok di bidang tersebut, mencari penyebab, menggali potensi desa yang dapat meminimalisir persoalan, setelah itu menentukan bagaimana alternatif tindakan yang layak untuk mengatasi persoalan dalam bidang masing-masing.

Pada saat pendampingan penyusunan draf RPJMDesa, banyak diantara aparatur desa yang tidak mengerti makna kata-kata yang tertulis di setiap format kajian. Hal ini dikarenakan aparatur desa belum familiar menggunakan format tersebut. Oleh karena itu sering terjadi kebingungan misalnya dalam mencari potensi desa dan bagaimana alternatif tindakannya. Meskipun sebenarnya format ini terbilang mudah untuk diaplikasikan, yang diperlukan adalah analisis data yang akurat untuk memudahkan input penulisan dan latihan secara berkesinambungan. Dengan keterbatasan aparatur Desa Banjarmadu, metode ini diberikan paling tidak sebagai pengenalan terutama bagi tim penyusun RPJMDesa agar dapat memahami butir-butir penting yang harus diperhatikan dan di-*input* dalam menyusun RPJMDesa. Banyak di antara aparatur desa yang antusias menanyakan dan berkonsultasi terkait permasalahan di bidangnya. Selama ini di Desa Banjarmadu belum pernah ada kegiatan yang memberikan ruang konsultasi dan pendampingan intensif dalam merumuskan program desa. Bahkan di akhir kegiatan ini ketua LPM dan kepala desa meminta dampingan lanjutan untuk membimbing dan mengevaluasi hasil kerja mereka dalam menyusun draf RPJMDesa pada implementasi nyata di kemudian hari.

Meskipun pemerintah pusat telah menyediakan tenaga pendamping desa di semua wilayah kabupaten dan kota di Indonesia yang diseleksi secara ketat, namun dalam aplikasinya di lapangan banyak ditemukan pendamping desa yang tidak berfungsi dan bekerja maksimal dalam mendampingi desa, sehingga masih ditemukan desa yang masih tertinggal dalam informasi, teknologi dan pembangunan lainnya seperti terjadi di Desa Banjarmadu, Karanggeneng. Terdapat beberapa temuan pendamping desa yaitu: pertama, karakter pendamping desa yang individual dan tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Kedua, pengetahuan minim dari pendamping desa terkait dengan kondisi dan ruang lingkup desa, sehingga pendamping desa tidak bisa bekerjasama dalam membangun desa, alhasil pekerjaan pemerintah ini terkesan sia-sia.

Tenaga pendamping desa tidak hanya didasarkan pada modal intelektualitas, tetapi juga mesti memiliki keterikatan jiwa sosial dengan desa. Sehingga transfer ilmu dari kaum intelektualitas dapat mudah disampaikan kepada aparatur desa dan masyarakat.

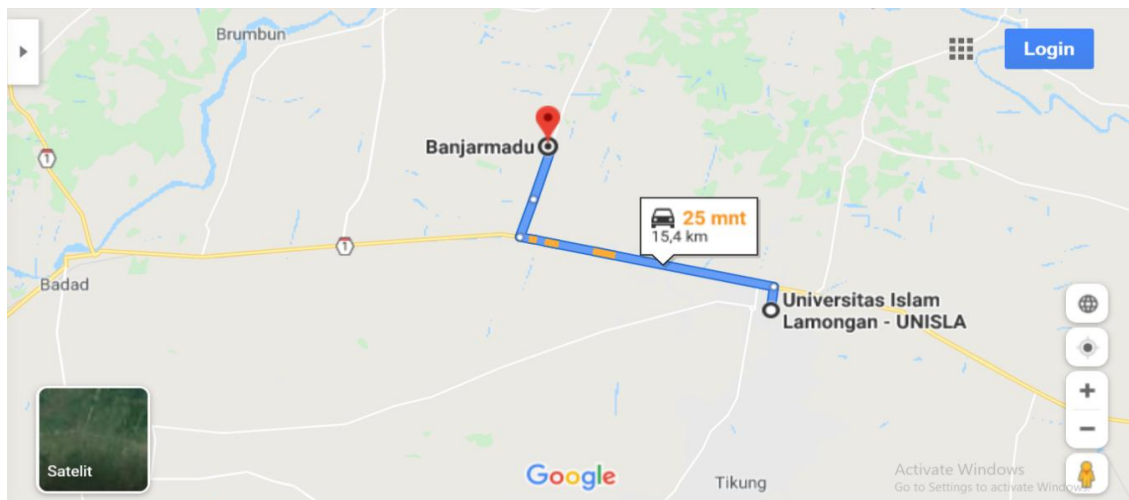




## 4. Kesimpulan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan adalah salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan oleh masyarakat desa yang belum berdikari. Metode analitis terhadap tindak pemecahan masalah adalah metode sederhana yang dapat diterapkan dengan mudah oleh masing-masing bidang pemerintahan desa untuk membuat draf RPJMDesa. Kebiasaan bisa dimulai dengan melakukan latihan-latihan penyusunan draf tersebut hingga menjadi sebuah keahlian memadai. Persoalan desa memerlukan perhatian semua pihak dan bantuan kerjasama antara beberapa elemen, baik dari institusi pemerintah daerah, akademisi, swasta, maupun masyarakat agar otonomi desa segera terwujud.

### PETA DESA



## 5. Daftar Pustaka

<https://portal.lamongankab.go.id/58-uncategorised/119-banjarmadu.html>

Pemerintah Negara Republik Indonesia (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.

Ritonga, I. T. (2009). *Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah di Indonesia*. Sekolah Pascasarjana UGM.

Sjafrizal. (2014). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

